



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</p>	NOMOR SOP	067/116
	TANGGAL PEMBUATAN	06 Januari 2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	06 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN Drs. ASEP NURDIANA, M.Si Pembina Utama Muda NIP.197302011993111001
	NAMA SOP	Pelayanan Legalisir Ijazah/ STTB/ DANEM/SKHU/SKYBS

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	1. Mempunyai ketelitian dalam memeriksa dokumen Ijazah/ STTB/ DANEM/SKHU/SKYBS 2. Memiliki kemampuan komunikasi dan pelayanan yang baik pada masyarakat.

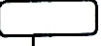


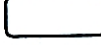
<p>2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;</p> <p>9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;</p> <p>10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p><u>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</u> Meja dan kursi, Alat Tulis Kantor, Stempel Legalisir, Stempel Dinas, Buku Agenda Legalisir</p>
<p>PERINGATAN Jika proses legalisir Ijazah/ STTB/ DANEM/SKHU/SKYBS maka legalisir tidak diproses agar dapat diperiksa keaslian dari piagam pemohon.</p>	<p><u>PENCATATAN DAN PENDATAAN</u> Ijazah/ STTB/ DANEM/SKHU/SKYBS</p>

PROSEDUR PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014; 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen;

2	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pemohon datang diterima petugas pada loby pelayanan, serahkan fotokopi ijazah/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS dengan dilampiri Aslinya</p> <p>b. Petugas menerima fotokopi ijazah/ STTB/ DANEM/ SKHU/ SKYBS dan dinaikan ke Kasubag Umpeg</p> <p>c. Kasubag Umpeg meneliti dan mengecek keaslian ijazah/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS, jika sudahsesuai dibubuhi paraf berjenjang</p> <p>d. Kasubag Umpeg memintakan paraf Sekretaris Dinas pada ijazah/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS melalui petugas</p> <p>e. Sekretaris Dinas membubuhi paraf pada ijazah/ STTB/ DANEM/ SKHU/ SKYBS yang akan di legalisasi</p> <p>f. Sekretaris Dinas meminta petugas memintakan asman pengesahan kepada Kepala Dinas selaku pejabat yang diberikan kewenangan untuk menandatangani legalisasi ijazah/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS</p> <p>g. Petugas menerima legalisasi yang sudah ditandatangani, mencatat pada buku agenda legalisasi dan memberikan nomor legalisasi serta membubuhi stempel Dinas</p> <p>h. Menyerahkan hasil legalisasi ijazah/ STTB/ DANEM/ SKHU/ SKYBS kepada pemohon</p> <p>i. selesai</p>
3	Prosedur Pelayanan legalisasi ijazah/ STTB/ DANEM/ SKHU/SKYBS	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Kasubag Umpeg meneliti dan mengecek keaslian ijazah/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS] B --> C[Sekretaris Dinas membubuhi paraf pada fotokopi ijazah/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS yang akan dilegalisir] C --> D[Kepala Dinas mengesahkan ijazah/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS dengan membubuhi tanda tangan] D --> E[Petugas mencatat pada buku agenda dilanjutkan pembubuhan stempel dinas] E --> F[Pemohon menerima legalisir ijazah/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS dari petugas] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	22 menit
5	Biaya/ tarif	GRATIS

SOP LEGALLISIR IJAZAH/STTB/DANEM/SKHU/SKYBS

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Petugas	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Penerimaan berkas yang dimintakan surat keterangan					Ruang tamu, form kendali surat, alat tulis kantor	2 menit	Penerimaan dokumen yang dimintakan paraf	
2.	Pemeriksaan / penelitian keabsahan dokumen					Ruang tamu, form kendali surat, alat tulis, komputer	2 menit	Paraf penetapan keabsahan dokumen	
3.	Membuat surat keterangan dan menyampaikan ke Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian					Ruang kerja, meja kerja, alat tulis kantor	5 menit	Dokumen terbubuhi cap pengesahan	
4.	Diteruskan ke Sekretaris jika tidak setuju dikembalikan ke Ka subbag Umum dan Kepegawaian, jika setuju diparaf diteruskan/dinaikan ke Kepala Dinas					Dokumen yang sudah dibubuhi cap dan diparaf sekretaris	5 menit	Dokumen yang sudah diparaf sekretaris diteruskan ke Kepala Dinas	
5.	Kepala Dinas memeriksa surat keterangan, jika tidak setuju dikembalikan ke Sekretaris dan jika setuju ditanda tangani					Dokumen diparaf sekretaris	5 menit	Dokumen yang sudah ditanda tangani sekretaris/ kepala dinas	
6.	Menerima surat keterangan yang telah ditandatangani dan mengagendakan surat, membubuhkan nomor, tanggal, cap dinas					Dokumen dicatat ke buku ekspedisi dan dibubuhi stempel	2 menit	Dokumen diturunkan ke Staf	
7.	Penyerahan kembali kepada pemohon surat keterangan					Penyerahan dokumen kepada pemohon	1 menit	Dokumen diserahkan kepada pemohon	

